

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2021



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

---

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan  
[www.dishub.pacitankab.go.id](http://www.dishub.pacitankab.go.id)  
[dishub@pacitankab.go.id](mailto:dishub@pacitankab.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya pelayanan perhubungan yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Pacitan, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. WASI PRAYITNO, M. Sc**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	lii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
E. Sistematika	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja	36
B. Permasalahan dan Solusi	57
C. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV. PENUTUP	61
LAMPIRAN	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia PNS dan Pegawai Tidak tetap (PTT) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Bidang	9
Tabel 1.3	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum	9
Tabel 1.4	SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis	10
Tabel 1.5	Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	11
Tabel 1.6	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Program Kegiatan Tahun 2020	11
Tabel 2.1	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2020	17
Tabel 2.2	Rangkuman Hasil Analisa SWOT	19
Tabel 2.3	Pemetaan Interaksi Faktor	20
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020	27
Tabel 2.5	Standar Pencapaian Kinerja	32
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Program Tahun 2020	33
Tabel 3.1	Target Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	37
Tabel 3.2	Persentase Pencapaian Indikator kinerja	38
Tabel 3.3	Persentase Pencapaian Indikator kinerja	43
Tabel 3.4	Persentase Pencapaian Indikator kinerja	43
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan target 5 (lima ) tahunan	45
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan 2020	46
		59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2020
- Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2020
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 5 Capaian RPJMD Tahun 2020
- Lampiran 6 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan kebutuhan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pelayanan perhubungan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perhubungan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah turut serta koordinasi dengan dinas terkait. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah mencapai 100 %

(tercapai), sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi) sebesar adalah 99,19%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 1 program 14 kegiatan.

Secara umum kategori tercapai/berhasil ini disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan pelayanan perhubungan. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang pelayanan perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2021	Capaian (%)
1.	Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,11%	0,11%	100%
		Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	83,0%	83,0%	100%
		Jumlah sarana dan prasarana	75,9%	75,9%	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2021	Capaian (%)
		perhubungan			
2.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan Bidang Perhubungan	100 %	100%	100%
3.	Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	12 bln	12 bulan	100%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan secara umum realisasi indikator kinerja telah tercapai. Tentu saja dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian sasaran, dimana dalam hal ini tertuang dalam program dan kegiatan bidang pelayanan perhubungan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 merencanakan sebanyak 1 program dan 14 kegiatan yang telah terealisasi seluruhnya.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Anggaran. Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 15.225.871.085,00 dari target belanja sebesar Rp 15.350.255.866,00 atau 99,19%.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Menyadari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2021 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui

pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **B. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dirubah menjadi Undang – undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berdasarkan suatu sistem Akuntabilitas yang ditentukan.

Tujuan dari laporan ini antara lain adalah :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
3. Sebagai bahan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pacitan.

#### **D. SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA**

##### **1. Struktur organisasi**

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2018.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

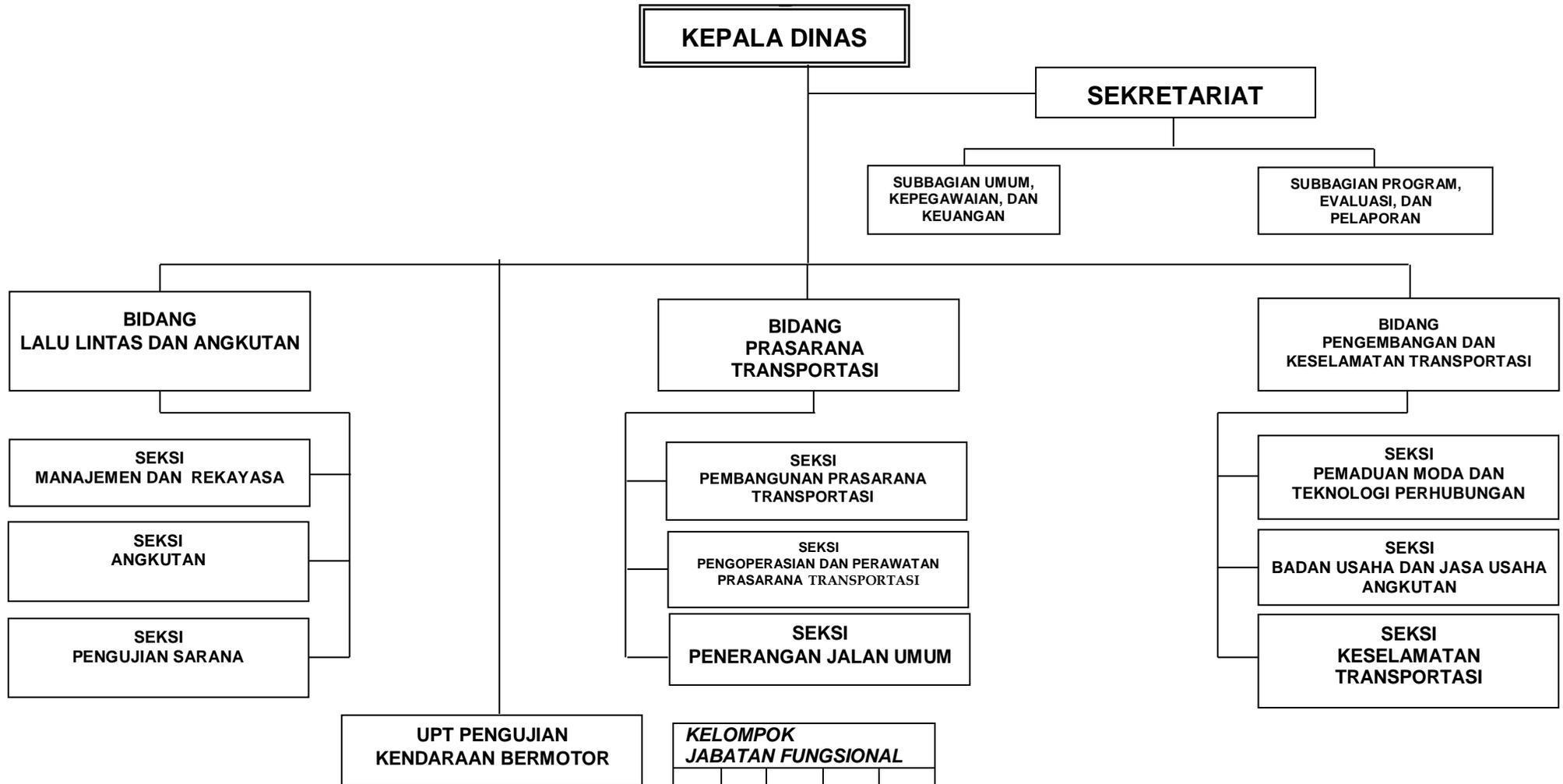
- (1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- (2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- (3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi; dan

(4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
  2. Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
  2. Seksi Angkutan; dan
  3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan;
- d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :
  1. Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi;
  2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi; dan
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
  1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan; dan
  3. Seksi Keselamatan Transportasi;
- f. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**



## 2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan berjumlah 49 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan:

**Tabel 1.1**  
**SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Kepala Dinas
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	Sekretaris Dinas
	Pembina	IV/a	3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana Transportasi, Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi
2.	Penata Tingkat I	III/d	7	2 Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, 1 Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan, 3 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, 1 Bidang Prasarana Transportasi
	Penata	III/c	1	1 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	1 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, 1 Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Penata Muda	III/a	3	1 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, 1 Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang Prasarana Transportasi
3.	Pengatur Tingkat I	II/d	14	5 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, 4 Bidang Prasarana Transportasi, 2 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, 1 Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, 2 Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur	II/c	4	1 Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, 2 Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, 1 Bidang Prasarana Transportasi
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1	1 Bidang Prasarana Transportasi
4.	PTT (SK Bupati)		2	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021

**Tabel 1.2**  
**Sumber Daya Manusia**  
**PNS Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang**

NO	URAIAN	PNS			PTT		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	Sekretariat	7	5	12	6	1	7
2	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	8	0	8	2	1	3
3	Bidang Prasarana Transportasi	10	0	10	3	0	3
4	Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	8	0	8	1	1	2
5	UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7		7	3	1	4
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021*

**Tabel 1.3**  
**SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**  
**Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum**

NO	PENDIDIKAN UMUM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana (S-2)	5	1 Eselon II, 2 Eselon III, 1 Eselon IV
2	Sarjana (S-1)	10	8 Eselon IV, 2 Staf
3	Diploma III	3	1 Eselon IV, 2 Staf
4	Diploma II	2	Staf
5	SMU / SMK	25	1 Eselon IV, 24 Staf
	<b>J U M L A H</b>	<b>45</b>	

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021*

**Tabel 1.4**  
**SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**  
**Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis**

NO	PENDIDIKAN TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diploma IV Transportasi Darat	1	1 orang Staf Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi
2	Diploma III LLAJ	1	1 orang Staf Seksi Angkutan
3	Diploma II Penguji Kendaraan Bermotor	2	1 orang Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan 1 orang Staf Seksi Pengujian Sarana
4	DIKLAT Manajemen Transportasi	5	3 Org Bidang lalu lintas, 2 Org Bidang Angkutan
5	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor PKB	3	3 orang Penguji Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Sarana
6	Diklat PPNS LLAJ	1	1 orang Kasi Manajemen dan Rekayasa
7	Diklat Motoris	1	1 Staf Seksi Keselamatan Trnasportasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021

Sebagai fungsi pelayanan masyarakat disektor perhubungan komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sudah proposional namun akan diupayakan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan prinsip *the right man on the job* dan *the right man on the right place* melalui dukungan untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum dan

pendidikan teknis yang semuanya sangat penting untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas.

### **3. Sarana dan prasarana**

Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan meliputi Kantor (status masih menumpang di gedung kantor Terminal Tipe A Pacitan yang sudah diambil alih Kementerian Perhubungan), 4 Terminal Tipe C, 1 tempat uji kir kendaraan ,Kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik.

Adapun untuk peralatan penunjang sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH UNIT</b>
1	Mobil Dinas	2
2	Mobil pick up/opersional	1
4	Mobil sky lift	1
5	Mobil Bus	3
6	Sepeda motor	9
7	Gerobak dorong	9
8	Peti uang/brankas	1
9	Rak kayu	4
10	Lemari arsip	3
11	Lemari kayu	7
12	Pesawat telepon	1
13	Pesawat HT	30
14	Kursi rapat	31
15	Meja kayu	39
16	Meja rapat	12
17	Meja resepsionis	1
18	Meja panjang	4
19	Kursi putar	5
20	Kursi biasa	4
21	Kursi lipat	8
22	Meja komputer	7
23	Meja tamu	2
24	Meja kursi kantor	2
25	Lemari es	3
26	AC	19
27	Kipas angin	2
28	Kompor gas	1
29	Televisi	3
30	PC Komputer	41
31	Laptop	14
32	Printer	28

**Tabel 1.6**  
**Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja**  
**Langsung**  
**Untuk Program Kegiatan Tahun 2021**

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan ( Rp)	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)
1	2	3
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.440.262.500,00</b>	<b>2.143.739.500,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.907.782.808,00</b>	<b>15.350.255.866,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.728.097.608,00</b>	<b>14.654.953.066,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.685.200,00</b>	<b>695.302.800,00</b>
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>	<b>13.907.782.808,00</b>	<b>15.350.255.866,00</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.306.244.952,00</b>	<b>12.209.110.700,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.836.471.302,00</b>	<b>3.650.108.314,00</b>
Penyediaan Gaji dan	3.795.919.302	3.616.556.314,00

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan ( Rp)	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)
1	2	3
Tunjangan ASN		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.552.000,00	33.552.000,00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>457.468.725,00</b>	<b>411.308.025,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.556.800,00	160.100.800,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.445.925,00	193.940.475,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.446.000,00	42.266.750,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.855.223.125,00</b>	<b>8.028.961.261,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.482.196.000,00	7.629.141.261,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.027.125,00	399.820.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.081.800,00</b>	<b>78.733.100,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	71.609.800,00	53.261.100,00

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan ( Rp)	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)
1	2	3
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.472.000,00	25.472.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	2.601.537.856,00	3.141.145.166,00
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>692.275.000,00</b>	<b>692.275.000,00</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	133.600.000,00	68.340.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	558.675.000,00	623.935.000,00
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>340.500.000,00</b>	<b>242.500.000,00</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	340.500.000,00	242.500.000,00
<b>Penerbitan Izin</b>	<b>666.367.550,00</b>	<b>747.936.500,00</b>

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan ( Rp)	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)
1	2	3
<b>Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	666.367.550,00	747.936.500,00
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>336.580.000,00</b>	<b>324.080.000,00</b>
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	144.366.000,00	144.366.000,00
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12.375.000,00	7.375.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.914.000,00	106.914.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.925.000,00	65.425.000,00
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>285.849.975,00</b>	<b>857.388.335,00</b>
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<b>157.849.975,00</b>	<b>857.388.335,00</b>

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan ( Rp)	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)
1	2	3
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	128.000.000,00	54.955.000,00
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>169.965.331,00</b>	<b>209.965.331,00</b>
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	169.965.331,00	209.965.331,00
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.000.000,00	18.500.000,00
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	40.000.000,00	18.500.000,00

### **C. SISTEMATIKA**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

#### **Bab I – Pendahuluan,**

Menjelaskan secara singkat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sarana dan prasarana serta sistematika penyusunan.

#### **Bab II - Perencanaan Kinerja,**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2021 dan penetapan kinerja untuk Tahun Anggaran 2021.

#### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja ,**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan evaluasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun Anggaran 2021.

#### **Bab IV - Penutup,**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis 2016 – 2021 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

#### **1. V i s i**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kabupaten Pacitan periode 2016 – 2021 adalah:

#### **“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”**

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman

yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai Perangkat Daerah di bawah Bupati Pacitan harus mendukung untuk mewujudkan target dari visi Bupati Pacitan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2. M i s i**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Bupati Pacitan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan masuk dalam misi ke-3 dari Bupati Pacitan periode 2016 – 2021 yaitu:

- Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dengan urusan perhubungan sebagai penggerak dan pendorong perekonomian di Kabupaten Pacitan diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat Pacitan sesuai dengan urusan yang diembannya untuk mencapai Misi Kabupaten Pacitan Periode 2016 - 2021

## **3. T u j u a n**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi Bupati Pacitan untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini

dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati Pacitan telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah.

#### **4. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET TAHUNAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai	1. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan	0,17%	0,16%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET TAHUNAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
dengan standar pelayanan minimal	angkutan umum dan angkutan barang						
	2. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	0%	16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET TAHUNAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	daerah						

## **5. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Dalam pembangunan transportasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan sesuai cakupan kewenangannya masing masing untuk menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan sistem transportasi yang efisien dan handal. Namun demikian, karena sifat pelayanan transportasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga pembangunan transportasi harus dilakukan secara terintegrasi antara sistem transportasi nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi kota/kabupaten.

Untuk mewujudkan transportasi yang efisien dan handal tersebut maka perlu dilakukan pencermatan terhadap lingkungan strategis baik internal (kekuatan / strength dan kelemahan / weakness) maupun eksternal (peluang / opportunity dan tantangan / threat) yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Pacitan baik saat ini maupun masa mendatang.

Dengan mengetahui lingkungan strategis yang ada, maka dapat ditetapkan langkah langkah strategis untuk mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi tantangan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Melalui metode analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threat*) ,yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 Kelompok strategi yaitu :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ;

**Tabel 2.2**  
**Rangkuman hasil analisis SWOT**  
**Faktor - Faktor Internal**

( S ) STRENGHT/KEKUATAN	( W )WEAKNESS/KELEMAHAN
1. Undang-undang dan Peraturan – peraturan di bidang perhubungan . 2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan . 3. SDM Dibidang Perhubungan	1. Undang-undang dan peraturan dibidang perhubungan harus dilaksanakan dilapangan. 2. Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang masih kurang. 3. Sumber daya manusia di bidang perhubungan yang masih kurang.

**Faktor – Faktor Eksternal**

( O ) OPPORTUNITY / PELUANG	( T ) THREAT/TANTANGAN
1. Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan	1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan

<p>Diklat Perhubungan Dephub dan Badan Diklat Prov. Jawa Timur.</p> <p>2. Posisi strategis memiliki destinasi wisata yang menjadi bangkitan yang cukup besar</p> <p>3. Potensi pengembangan Wilayah Kabupaten sebagai kota pariwisata, kota agropolitan, dan kota minapolitan.</p>	<p>tingginya tingkat kepemilikan kendaraan .</p> <p>2. Globalisasi dan pasar bebas.</p> <p>3. Masih rendahnya dana alokasi dari APBN dan APBD untuk pengembangan transportasi di Kabupaten Pacitan.</p>
--	---

**Tabel 2.3**  
**Pemetaan interaksi faktor**  
**Pemetaan Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal**

<b>Analisis Lingkungan Internal</b>	<b>KEKUATAN ( <i>strenght</i> )</b>	<b>KELEMAHAN ( <i>weakness</i> )</b>
<b>Analisis Lingkungan Eksternal</b>	<p>1. Adanya Undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009 tentang LLAJ , peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Dinas Perhubungan , Perbup tentang Tupoksi Dinas serta Perbup lainnya yang mengatur Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.</p> <p>2. Bertambahnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dari tahun ketahun.</p> <p>3. Banyaknya sdm dinas</p>	<p>1. Belum maksimalnya pelaksanaan undang-undang dan peraturan dibidang perhubungan yang dilaksanakan dilapangan ;</p> <p>2. Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang masih kurang.</p> <p>3. Sumber daya manusia dan di bidang perhubungan yang masih kurang.</p>

	<p>perhubungan yang mengikuti diklat yang di adakan Badan Diklat Pemerintah Propinsi dan Dishub Propinsi tujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan seperti di bidang uji kir, terminal dan parkir</p>	
<p>PELUAN G ( <i>opportunity</i> )</p>	<p>Strategi S + O</p>	<p>Strategi W + O</p>
<p>4. 1. Posisi strategis memiliki destinasi wisata yang menjadi bangkitan yang cukup besar</p> <p>2. Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari Badan Diklat Perhubungan Dephub dan Badan Diklat Prov. Jawa Timur.</p> <p>3. Potensi pengembangan Wilayah Kabupaten sebagai kota pariwisata, kota agropolitan,</p>	<p>1. Maksimalkan Pelaksanaan undang ataupun peraturan di bidang lalu lintas guna meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pacitan dalam rangka menarik wisatawan untuk memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Pacitan yang memiliki destinasi wisata yang menjadi bangkitan cukup besar. (S1-O1)</p> <p>2. Optimalkan Potensi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam rangka meningkatkan</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, Ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi dalam pemanfaatan posisi strategis sebagai destinasi wisata.(W2-01)</p> <p>2. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan dengan sering mengikuti program pendidikan dan pelatihan SDM Bidang perhubungan (W3-O2)</p> <p>3. Peningkatan Penerapan</p>

dan kota minapolitan.	Wilayah Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata, kota agropolitan, dan kota minapolitan. (S2-O3)	undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan dinas perhubungan dengan mengikuti Program pendidikan dan pelatihan SDM bidang perhubungan dari badan diklat Perhubungan Dephub. (W3-02)
ANCAMA N ( <i>threats</i> )	Strategi S + T	Strategi W + T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi.</li> <li>2. Globalisasi dan pasar bebas.</li> <li>3. Masih rendahnya dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaatkan Kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi yang ada untuk melayani bertambahnya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan . (S2-T1)</li> <li>2. Optimalkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang transportasi di Kabupaten Pacitan sesuai dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana simpul transportasi, ruang lalu lintas transportasi dan jaringan pelayanan transportasi untuk mengatasi peningkatan lalu lintas dan tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi . (W1-T1)</li> <li>2. Tingkatkan Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di bidang perhubungan Guna mengatasi Globalisasi dan pasar bebas. (W2-T2)</li> </ol>

	kebutuhan Kabupaten Pacitan sehingga dapat meningkatkan dana alokasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan transportasi. (S2-T3)	
--	--	--

## **6. Kebijakan**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi maka diperlukan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program prioritas setiap sasaran. Oleh karena itu, berikut ini disampaikan kebijakan – kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya:

- Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah

Dengan semakin luasnya jaringan pelayanan jasa perhubungan yang tersedia di masyarakat, maka masyarakat semakin terjamin untuk dapat memilih berbagai macam moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan penggunaan sarana perhubungan diterapkan dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, serta dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini perlu diterapkan mengingat pada saat ini emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan polutan utama yang menyebabkan pencemaran udara.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menerapkan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

- i. Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan;
- ii. Optimalisasi fungsi sarana prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik;
- iii. Meningkatkan pemenuhan dan pengawasan Angkutan Umum dan Angkutan Barang yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- iv. Pemenuhan sarana prasarana perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah;
- v. Pemenuhan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan;
- vi. Meningkatkan Kinerja Aparatur Perhubungan dan Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Perhubungan;
- vii. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur perhubungan untuk optimalnya pelayanan bidang perhubungan;
- viii. Mengevaluasi dan memperbaiki kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah.

## **7. Program**

Dalam rangka mencapai sasaran dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, diuraikan program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri dari kegiatan :
  - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - b. PenyediaanPerlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - g. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - h. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota terdiri dari kegiatan
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang

program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021, secara rinci adalah sebagai berikut :

### **1. Sasaran yang ingin dicapai**

Sasaran Tahun 2021 yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra, sebagai berikut:

Misi (RPJMD 2016-2021) : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Tujuan (RPJMD 2016-2021) : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan

Sasaran (RPJMD 2016-2021) : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah

Tujuan Meningkatnya layanan infrastruktur : perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,11%
	2. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	83,0%

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan yaitu kegiatan:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
  - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahunan**  
**Tahun 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	:	Dana	Rp	40.000.000,-
			Output	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2
					Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	4
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4
			Outcomes	:	Nilai SAKIP PD	Angka	73
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input	:	Dana	Rp	3.836.471.302,-
			Output	:	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Bulan	14
					Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang dibayarkan	Bulan	12
					Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	Dokumen	10

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR				TARGET
		Outcomes	:	Nilai Sakip PD	%	73
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input	:	Dana	Rp	457.468.725,-
		Output	:	Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan	12
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Bulan	12
		Outcomes	:	Nilai hasil survey IKM	angka	78
		4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	:	Dana
Output	:			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang d bayarkan	Bulan	12
				Jumlah pelayanan kantor yang mendapatkan honorarium jasa	Bulan	12
Outcomes	:			Nilai hasil survey IKM	Angka	78
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Input	:	Dana	Rp	117.081.800,-
		Output	:	Terpenuhinya jasa	Bulan	12

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		
				Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan	Bulan 12	
		Outcomes	:	Nilai hasil survey IKM	% 78	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	30.000.000,-
		Output	:	Jumlah dokumen fasilitas keselamatan yang disusun	Dokumen	1
		Outcomes	:	Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	0,12
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	692.275.000,-
		Output	:	Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan di jalan Kabupaten	Kec	12
				Jumlah PJU yang terpelihara	titik	3.827
		Outcomes	:	Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%	66

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET
				angkutan	
3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Input	:	Dana	Rp 340.500.000,-
		Output	:	Jumlah terminal tipe C yang terpelihara	Lokasi 5
		Outcomes	:	Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minima keselamatan	% 0,12
4	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Input	:	Dana	Rp 666.367.550,-
		Output	:	Jumlah petugas parkir yang mendapatkan honorarium jasa	orang 63
				Jumlah pengadaan pakaian lapangan	set 147
				Pembayaran bagi hasil retribusi ke bapenda provinsi dan Polres Pacitan	Bulan 12
		Outcomes	:	Nilai Hasil Survey IKM	angka 78
5	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input	:	Dana	Rp 336.580.000,-
		Output	:	Jumlah tersedianya bukti lulus uji	Set 3350
				Jumlah Survey kendaraan bermotor wajib uji	Kali 60

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET
				Jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi	unit 90
				Jumlah kendaraan lulus uji	unit 5700
		Outcomes	:	Presentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	% 8,68
6	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp 285.849.975,-
		Output	:	Jumlah koordinasi dan fasilitasi forum lalu lintas, WTN, IRSA, JKJ, PPTL, Abdiyasa, KTL dan Kabupaten Sehat	Kegiatan 8
				Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara : Traffic light, Warning light, rambu lalu lintas	unit 11; 4; 50
		Outcomes	:	Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	% 66,40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET	
				angkutan		
7	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Input	:	Dana	Rp	169.965.331,-
		Output	:	Jumlah operasi angkutan umum di jalan dan jumlah penyelenggaraan posko angkutan lebaran serta hari besar lainnya	Kegiatan	130
				Jumlah evakuasi kecelakaan lalu lintas	Kegiatan	20
		Outcomes	:	Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselanatan	%	0,12
8	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp	40.000.000,00
		Output	:	Jumlah badan usaha dan jasa usaha angkutan yang difasilitasi	Orang	90
		Outcomes	:	Presentase angkutan umum yang	%	0,12

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET
				sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	
9	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	:	Dana	Rp 40.000.000,00
Output		:	Jumlah fasilitasi pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan	Orang 100	
Outcomes		:	Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	% 0,12	

## 2. Standard Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Standar Pencapaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
85 – 100	Sangat tercapai/Sangat berhasil
70 - < 85	Tercapai/Berhasil
55 - < 70	Cukup tercapai/Cukup berhasil

< 55	Tidak tercapai/Tidak berhasil
------	-------------------------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disampaikan pula Rencana Kerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dengan Bupati Pacitan pada Tahun 2021, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. 1	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,11%
		1. 2	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	83%
		1. 3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan	8,57%
2.	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	2. 1	Nilai hasil survey IKM	79%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
3.	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perhubungan	3.1	Nilai Sakip PD	74%

**Tabel 2.7**  
**Pagu Anggaran Program Tahun 2021**

Kegiatan		Anggaran		Keterangan (Sumber Dana)
		Induk	Perubahan	
1	Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	DAU
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.836.471.302,-	Rp. 3.650.108.314,-	DAU
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 457.468.725,-	Rp. 411.308.025,-	DAU
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.855.223.125,-	Rp. 7.982.016.000,-	DAU
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 117.081.800,-	Rp. 78,733,100,-	DAU
6	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	DAU
7	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 692.275.000,-	Rp. 692.275.000,-	DAU
8	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 340.500.000,-	Rp. 242.500.000,-	DAU
9	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 666.367.550,-	Rp. 747.936.500,-	DAU

Kegiatan		Anggaran		Keterangan (Sumber Dana)
		Induk	Perubahan	
10	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 336.580.000,-	Rp. 324.080.000,-	DAU
11	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 285.849.975,-	Rp. 857.388.335,-	DAU
12	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 169.965.331,-	Rp. 209,965,331,-	DAU
13	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000,-	Rp. 18.500.000,-	DAU
14	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	DAU
<b>JUMLAH</b>		Rp. 13.907.782.808,-	Rp. 15.350.255.866,-	

Kemudian pada bulan Oktober 2021 ada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2021 sehingga terjadi penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang disebabkan adanya penambahan dan pengurangan target dari output kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.616.556.314,00

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 160.100.800,00,-
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  - Sub Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 7.629.141.261,00,-
4. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota :
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 623.935.000,00
5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota :
  - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 802.433.335,00

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di Bidang Perhubungan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah Indikator Kinerja Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada realisasi pencapaian target dari indikator kinerja.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

### 1. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah direncanakan. Sehingga pencapaian sasaran untuk tahun 2021 tercapai seluruhnya sesuai dengan yang telah tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap sasaran dalam Rencana Strategis yang dimaksud dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.**  
**Target Indikator Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2015	TARGET TAHUNAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,17%	0,16%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%
	2. Persentase angkutan	0%	16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83,0%

	umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan						
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	12 bln					

Untuk lebih jelasnya dari pencapaian sasaran tersebut di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Persentase Pencapaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Persentase penurunan jumlah	%	0,11	0,11%	100%	Tercapai

	kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang					
2.	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	83	83%	100%	Tercapai
3.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan	%	100	100%	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	bulan	12	12 bulan	100%	Tercapai

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target 5 (Lima) Tahunan**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
1.	Meningkatnya keselamatan, keamanan,	Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan	0,12%	0,12%	100%

No .	Sasaran	Indikator Sasaran	Targe t	Realisa si 2020	Capaia n (%)
	serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal	angkutan umum dan angkutan barang			
		Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	66,4%	66,4%	100%
2.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	12 bulan	12 bulan	100%
<b>Total Prosentase</b>					<b>100%</b>

NO	ASPEK/ FOKUS/ URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target 2021	REALISASI			KE T
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	4	6	7	7	8
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
	<b>Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar</b>					
	<b>Perhubungan</b>					
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	6.685.3 64	6.781.727	4.408.1 24	4.942.3 11	
9.2	Rasio ijin trayek	0,0084	0,0093	0.0087	0,0085	
9.3	Rasio uji KIR angkutan umum	58,00	51,46	33.75	31,15	
9.4	Rasio angkutan melalui terminal	1.533	1,5379	1.150	0.223	
9.5	Rasio penumpang melalui terminal	4.96	4,94	3.710	3,731	
9.6	Rasio angkutan umum terhadap jumlah penumpang	0.0085	0,009	0.0084	0.0085	
9.7	Persentase sarana dan prasarana perhubungan	77,91	67,36	72.60	77,92	
9.8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)	30	30	30	30	
9.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	75000	75.000	75000	75000	
9.1 0	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	100	87,46	93.51	100	
9.1 1	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan	83,4	63,22	73.20	83,72	

9.1 2	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	72	61,23	67.30	72,01	
9.1 3	Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)	40	42	40.20	43,45	
9.1 4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	61	52,01	56.01	61	
9.1 5	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas	95	82,22	89.02	95	
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur</b>					
	<b>Perhubungan</b>					
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	43,96	42,46	76.92	43,99	
1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	12.242. 792	11.710.00 5	140	9.341.2 50	

Berdasarkan Data di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPJMD) menunjukkan perkembangan sebagai berikut :

## **ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**

#### **Perhubungan**

##### **9.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Indikator Kinerja Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2021 sebesar 4.942.311 atau mencapai 0,74% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum

mencapai target RPJMD tahun 2021 dikarenakan adanya covid-19 dan diberlakukannya mobilitas masyarakat

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota  
output Jumlah koordinasi forum LLAJ (WTN, IRSA, Pacitan Sehat)Jumlah forum lalu lintas yang di fasilitasi (WTN,IRSA,Kabupaten Sehat,PPKTLSosialisasi Ketertiban
- Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

## **9.2 Rasio Ijin Trayek**

Indikator Kinerja Rasio ijin trayek pada tahun 2021 sebesar 0,0085% atau mencapai 1,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui penertiban perijinan angkutan umum yang dilakukan secara periodik

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota  
output Jumlah koordinasi forum LLAJ (WTN, IRSA, Pacitan Sehat)Jumlah forum lalu lintas yang di fasilitasi (WTN,IRSA,Kabupaten Sehat,PPKTLSosialisasi Ketertiban

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.3 Rasio Uji KIR Angkutan Umum**

Indikator Kinerja Rasio uji KIR angkutan umum pada tahun 2021 sebesar 31,15% atau mencapai 0,54% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 dan pengoperasian kendaraan wajib uji berkurang.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah tersedianya bukti lulus uji
- b. Sub Kegiatan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dengan output Jumlah survey kendaraan bermotor wajib uji
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi
- d. Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah kendaraan lulus uji

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.4 Rasio Angkutan Melalui Terminal**

Indikator Kinerja Rasio angkutan melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 0,223% atau mencapai 0,15% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 dikarenakan Mobilitas masyarakat

beralih dari angkutan umum ke mobil pribadi dan sepeda motor

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan output Jumlah terminal tipe C yang terpelihara.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

## **9.5 Rasio Penumpang Melalui Terminal**

Indikator Kinerja Rasio penumpang melalui terminal pada tahun 2021 sebesar 3,731% atau mencapai 0,75% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 dikarenakan mobilitas masyarakat beralih dari angkutan umum ke mobil pribadi dan sepeda motor.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung kegiatan Pengelolaan terminal penumpang tipe C dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan output Jumlah terminal tipe C yang terpelihara

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

## **9.6 Rasio Angkutan Umum Terhadap Jumlah Penumpang**

Indikator Kinerja Rasio angkutan umum terhadap jumlah penumpang pada tahun 2021 sebesar 0,0085% atau mencapai 1,00% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021, mobilitas masyarakat saat ini beralih dari angkutan umum ke mobil pribadi dan sepeda motor.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah koordinasi dan fasilitasi forum lalu lintas, WTN, IRSA, JKJ, PPTL, Abdiyasa, KTL dan Kabupaten Sehat

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

## **9.7 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2021 sebesar 77,92% atau mencapai 1,00% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui Pemeliharaan PJU, rambu dan terminal secara rutin.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Capaian kinerja tahun 2021 mencapai kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.8 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Menit)**

Indikator Kinerja lama pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2021 sebesar 30 menit atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2020 melalui pemberlakuan SOP Pengujian Kendaraan Bermotor

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah tersedianya bukti lulus uji

2. Sub Kegiatan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dengan output Jumlah survey kendaraan bermotor wajib uji
3. Sub kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi
4. Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah kendaraan lulus uji

Capaian kinerja tahun 2021 sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.9 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (RP)**

Indikator Kinerja Biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2021 sebesar 75.000,00 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 melalui peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah tersedianya bukti lulus uji
2. Sub Kegiatan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dengan output Jumlah survey kendaraan bermotor wajib uji

3. Sub kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi
4. Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output Jumlah kendaraan lulus uji

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

#### **9.10 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu**

Indikator Kinerja Persentase Pemasangan Rambu-Rambu pada tahun 2021 sebesar 100% atau mencapai 1,00% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2020 dicapai melalui pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan output Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.11 Persentase Penerapan Norma Keselamatan Bidang Perhubungan**

Indikator Kinerja Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan pada tahun 2021 sebesar 83,72% atau mencapai 0,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui operasi angkutan umum di jalan.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. dengan output Jumlah operasi angkutan umum di jalan.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.12 Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik**

Indikator Kinerja Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 72,01% atau mencapai 0,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui pemeliharaan PJU secara rutin dan Pemeliharaan Terminal Tipe C, Pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan secara periodik

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.13 Persentase Angkutan Laik Jalan (Lulus Uji)**

Indikator Kinerja Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji) pada tahun 2021 sebesar 43,45% atau mencapai 0,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui terkalibrasinya peralatan pengujian dan terlaksananya pembinaan perbengkelan dan terlaksananya operasi angkutan umum di jalan

Capaian kinerja tahun 2020 ini didukung dengan kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi.

2. sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. dengan output Jumlah operasi angkutan umum dijalan

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

#### **9.14 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2021 sebesar 61% atau mencapai 0,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui Pembangunan PJU, pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan secara periodik

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **9.15 Persentase Tersedianya Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas**

Indikator Kinerja Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengaman lalu lintas pada tahun 2021 sebesar 95% atau mencapai 0,01% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan output

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

## **ASPEK DAYA SAING DAERAH**

### **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

#### **Perhubungan**

#### **1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

Indikator Kinerja Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2021 sebesar 43,99% atau mencapai 1,00% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 dicapai melalui terbangunnya pelebaran jalan yang ada di jala Kabupaten

Capaian kinerja tahun 2022 ini didukung dengan :

1. Peningkatan jumlah kendaraan tiap tahunnya
2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan

### **1.1 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Indikator Kinerja Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2021 sebesar 9.341.250 atau mencapai 0,76% dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 dikarenakan adanya covid-19 banyak angkutan umum yang tidak jalan dan juga di batasi aturan untuk mengurangi kegiatan mobilitas masyarakat

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020

### **c. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pada Tahun 2021 antara lain :**

1. Masih terbatasnya tenaga teknis yang memiliki kompetensi bidang perhubungan darat, laut, udara

2. Kelanjutan pembangunan pelabuhan niaga pacitan dan jalan akses menuju Pelabuhan niaga Pacitan. Serta pengembangan lapangan terbang “DETASEMEN TNI AU PACITAN” untuk Penerbangan Perintis Insidental.
3. Masih kurangnya sarana pengendali dan pengaman lalu lintas seperti rambu, marka, guardrail, Penerangan Jalan Umum pada jalan Kabupaten, jalan Provinsi, dan jalan nasional yang ada di Kabupaten Pacitan

**d. Solusi yang dilaksanakan adalah :**

1. Meningkatkan kemampuan teknis staf sesuai spesifikasi bidang pekerjaan melalui diklat teknis bidang perhubungan aupun bidang yang lain
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR) tentang kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan dan Jalan akses menuju pelabuhan, serta pengurusan ijin dari KOOPSAU II LANUD ISWAHYUDI untuk peningkatan pelayanan “DETASEMEN TNI AU PACITAN” sebagai Bandara Perintis Insidental
3. Menambah anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada kegiatan Pembangunan Sarana Pengendali Pengaman Lalu Lintas (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, PJU, dll) kepada Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur) maupun Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan)

**e. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 15.350.255.866,- dari target belanja sebesar Rp 15.225.871.085,00 atau 99,19%. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah

berdasarkan program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.057.882.500,00</b>	<b>2.273.475.000,00</b>	<b>110,48</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.350.255.866,00</b>	<b>15.225.871.085,00</b>	<b>99,19</b>
<b>urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>	<b>15.350.255.866,00</b>	<b>15.225.871.085,00</b>	<b>99,19</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.209.110.700,00</b>	<b>12.114.886.371,00</b>	<b>99,23</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>39.881.000,00</b>	<b>99,70</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.940.500,00	99,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	4.962.000,00	99,24
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.978.500,00	99,86

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Presentas e
1	2	3	4
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.650.108.314,00</b>	<b>3.579.075.705,00</b>	<b>98.05</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.616.556.314,00	3.545.559.405,00	98.04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.552.000,00	33.516.300,00	99.89
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>411.308.025,00</b>	<b>409.650.630,00</b>	<b>99.60</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.627.800,00	97.52
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.100.800,00	159.626.600,00	99.70
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	193.940.475,00	193.315.730,00	99.68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.266.750,00	42.080.500,00	99.56
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.028.961.261,00</b>	<b>8.009.519.036,00</b>	<b>99.76</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.629.141.261,00	7.623.841.004,00	99.93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	399.820.000,00	385.678.032,00	96.46

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Presentas e
1	2	3	4
Kantor			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.733.100,00</b>	<b>76.760.000,00</b>	<b>97.49</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.261.100,00	51.411.000,00	96.53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.472.000,00	25.349.000,00	99.52
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.141.145.166,00</b>	<b>3.110.984.714,00</b>	<b>99.04</b>
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.314.000,00</b>	<b>97.71</b>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.314.000,00	97.71
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>692.275.000,00</b>	<b>688.001.284,00</b>	<b>99.38</b>
Penyediaan Perlengkapan Jalan di	68.340.000,00	65.921.000,00	96.46

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Presentas e
1	2	3	4
Jalan Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	623.935.000,00	622.080.284,00	99.70
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>242.500.000,00</b>	<b>241.674.000,00</b>	<b>99.66</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	242.500.000,00	241.674.000,00	99.66
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>747.936.500,00</b>	<b>736.709.230,00</b>	<b>98.50</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	747.936.500,00	736.709.230,00	98.50
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>324.080.000,00</b>	<b>323.479.850,00</b>	<b>99.81</b>
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	144.366.000,00	144.076.600,00	99.80
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	7.375.000,00	7.370.000,00	99.93

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Presentas e
1	2	3	4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	106.914.000,00	106.718.250,00	99.82
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.425.000,00	65.315.000,00	99.83
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>857.388.335,00</b>	<b>857.388.335,00</b>	<b>98.57</b>
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	857.388.335,00	845.134.300,00	98.35
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	54.955.000,00	47.884.500,00	87.13
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>209.965.331,00</b>	<b>209.672.050,00</b>	<b>99.86</b>
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	209.965.331,00	209.672.050,00	99.86

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan ( Rp)	Realisasi ( Rp)	Presentas e
1	2	3	4
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18.500.000,00	18.500.000,00	100
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100</b>
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	18.500.000,00	18.500.000,00	100

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sesuai alokasi anggaran APBD yang

telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang Perhubungan wajib mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya sesuai dengan TUPOKSI yaitu melalui pemberdayaan semua potensi yang ada guna tercapainya efektifitas dan efisiensi termasuk kualitas dan kuantitas di masing – masing Unit.

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, maka hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ada dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memiliki kategori pencapaian tercapai/berhasil dengan rata-rata pencapaian lebih dari 90%. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,24%

Meskipun tingkat pencapaian kinerja program, kinerja kebijaksanaan dan kinerja kegiatan masuk dalam kategori tercapai atau berhasil, namun demikian masih perlu adanya peningkatan sesuai dengan yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Dalam menindak lanjuti kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa mendatang, hendaknya untuk memenuhi kriteria pencapaian kinerja dan mempermudah proses perhitungan kinerja, perlu dilakukan analisis mendalam yang lebih sistematis terhadap pencapaian kinerja, serta perlu dilakukan dan didukung terhadap kebijaksanaan, program, kegiatan yang lebih menonjolkan terhadap permasalahan – permasalahan yang lebih prioritas agar terjadi kesesuaian

terhadap upaya mendorong kearah pencapaian pelayanan publik yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang menggambarkan Capaian Kinerja setiap indikator kinerja yang merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Tahun Anggaran 2021.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001